

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP KINERJA KESEHATAN DAN PANGAN

Banda Aceh, Rabu (18 Desember 2019), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Kinerja Kesehatan dan Pangan kepada Lembaga Legislatif dan Eksekutif Pemerintah Kota Sabang, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Aceh Utara.

LHP atas Pemeriksaan Kinerja Kesehatan ini diserahkan oleh Plh. Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Syafruddin Lubis, S.E., Ak., CA.** Acara ini dihadiri oleh **Muhammad Nasir** selaku Ketua DPRK Sabang, **Arafat Ali** selaku Ketua DPRK Aceh Utara, **Abdul Kadir Jailani** selaku Ketua DPRK Pidie Jaya, **H. Munir Ubit** selaku Ketua Komisi B DPRK Aceh Barat Daya, **Nazaruddin, S.I.Kom.** selaku Walikota Sabang, **Fauzi Yusuf** selaku Wakil Bupati Aceh Utara, **H. Said Mulyadi, S.E., M.Si.** selaku Wakil Bupati Pidie Jaya, dan **Muslizar, M.T.** selaku Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

Dalam pidatonya, **Bapak Syafruddin Lubis** menyampaikan bahwa pemeriksaan kinerja di bidang kesehatan bertujuan untuk menilai efektivitas pengamanan produksi padi dalam rangka mendukung kemandirian pangan. Sedangkan pemeriksaan kinerja di bidang pangan bertujuan untuk menilai efektivitas pengamanan produksi padi dalam rangka mendukung kemandirian pangan. Selanjutnya, ada pula beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Pada Bidang Kesehatan Pemerintah Kota Sabang yaitu (1) Rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum disertai perhitungan skala prioritas dan belum sepenuhnya mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, (2) Pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum tepat sasaran, dan (3) Pemanfaatan DBH Pajak Rokok dan DOKA – Kesehatan pada beberapa program dan kegiatan belum sesuai rencana jadwal pemanfaatan.

Pada Bidang Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu (1) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan Rekapitulasi RDKK tidak valid sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pemesanan pupuk bersubsidi dan (2) Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) belum memadai kebutuhan ideal. Sedangkan pada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yaitu (1) Kegiatan pupuk bersubsidi belum dilaksanakan secara optimal dan (2) Pengelolaan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) belum optimal. Untuk Pemerintah Kabupaten Aceh Utara hal yang perlu diperhatikan yaitu (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pupuk bersubsidi belum dilakukan secara optimal dan (2) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara belum memiliki perencanaan kebutuhan alat dan mesin pertanian (Alsintan) untuk kelompok tani (Poktan) dan Brigade Alsintan yang handal.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kota dan Kabupaten yang bersangkutan atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan